

Laporan Kinerja
Kanwil DJKN DKI Jakarta
2022



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	1
	C. Peran Strategis Kanwil DJKN DKI Jakarta	5
	D. Sistematika Laporan	6
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	8
	A. Perencanaan Strategis	8
	B. Penetapan/Perjanjian Kinerja	11
	C. Pengukuran Kinerja	14
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	15
	A. Capaian Kinerja Organisasi	15
	B. Realisasi Anggaran	43
BAB IV	PENUTUP	47

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Permenpan Nomor 53/2014), Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta sebagai instansi pemerintah perlu menyusun LAKIN Tahun 2022 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis

Sesuai dengan Visi DJKN dan Visi Kanwil DJKN DKI Jakarta yaitu Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan : Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, Kanwil DJKN DKI Jakarta menjalankan tugas pokoknya sesuai dengan yang tertuang dalam Peta Strategis Kanwil DJKN DKI Tahun 2022 yang dijabarkan dalam Kontrak Kinerja Kanwil DJKN DKI Jakarta Tahun 2022 dengan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam LAKIN Kanwil DJKN DKI Jakarta dijabarkan realisasi pencapaian kinerja dibandingkan dengan target yang ditetapkan untuk tahun 2022.

Pada tahun 2022, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kanwil DJKN DKI Jakarta mencapai 112,92%. Nilai tersebut berasal dari Capaian Kinerja pada masing-masing perspektif yaitu Stakeholders Perspective (30%), Customer Perspective (16,13%) Internal Process Perspective (33,96%), dan Learning and Growth Perspective (32,83%).

Dengan disusunnya LAKIN Kanwil DJKN DKI Jakarta Tahun 2022 ini kiranya dapat diperoleh gambaran yang jelas dan transparan tentang kinerja Kanwil DJKN DKI Jakarta dalam upaya pencapaian visi dan misi DJKN. Kanwil DJKN DKI Jakarta senantiasa meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dengan dilandasi Nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan. LAKIN Kanwil DJKN DKI Jakarta Tahun 2022 ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi Kanwil DJKN DKI Jakarta untuk meningkatkan kinerjanya di tahun yang akan datang.

Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta

A.Y. Dhaniarto

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
IKHTISAR EKSEKUTIF	II
DAFTAR ISI	VIII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	1
C. Peran Strategis Kanwil DJKN DKI Jakarta	5
D. Sistematika Laporan	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Perencanaan Strategis	8
B. Penetapan/Perjanjian Kinerja	11
C. Pengukuran Kinerja	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. Capaian Kinerja Organisasi	16
B. Inisiatif Strategis	46
C. Realisasi Anggaran	47
BAB IV PENUTUP	50

IKHTISAR EKSEKUTIF

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD. Laporan Kinerja sebagai alat kendali dan penilai kinerja secara kuantitatif merupakan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tanggal 6 November 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kanwil DJKN DKI Jakarta mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang. Kanwil DJKN DKI Jakarta selaku instansi vertikal DJKN berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Kanwil DJKN DKI Jakarta membawahi 5 KPKNL, yaitu KPKNL Jakarta I sampai dengan KPKNL Jakarta V.

Kanwil DJKN DKI Jakarta mengemban visi DJKN yaitu Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan : Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk mewujudkan visi tersebut DJKN menetapkan misi yaitu :

1. Mewujudkan efektivitas pengelolaan kekayaan negara, efisiensi pengeluaran, optimalisasi penerimaan, dan pembiayaan dengan risiko minimum.
2. Meningkatkan tata kelola pengelolaan kekayaan negara dan investasi pemerintah yang dapat mewujudkan keseimbangan makro dalam pembangunan nasional melalui kebijakan investasi yang tepat, sehingga terjadi sinergi pemerintah, BUMN, dan sektor swasta.
3. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
4. Melaksanakan pengelolaan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

6. Mengelola sumber daya untuk pengelolaan kekayaan negara dan investasi pemerintah secara efisien.
7. Mengembangkan proses bisnis berbasis digital yang responsif dengan perkembangan teknologi.

LAKIN 2022 sebagai bentuk pertanggungjawaban Kanwil DJKN DKI Jakarta berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masing IKU dan hasil yang dicapai dari masing-masing IKU tersebut. Dalam melaksanakan tugas, Kanwil DJKN DKI Jakarta memiliki fungsi sebagai :

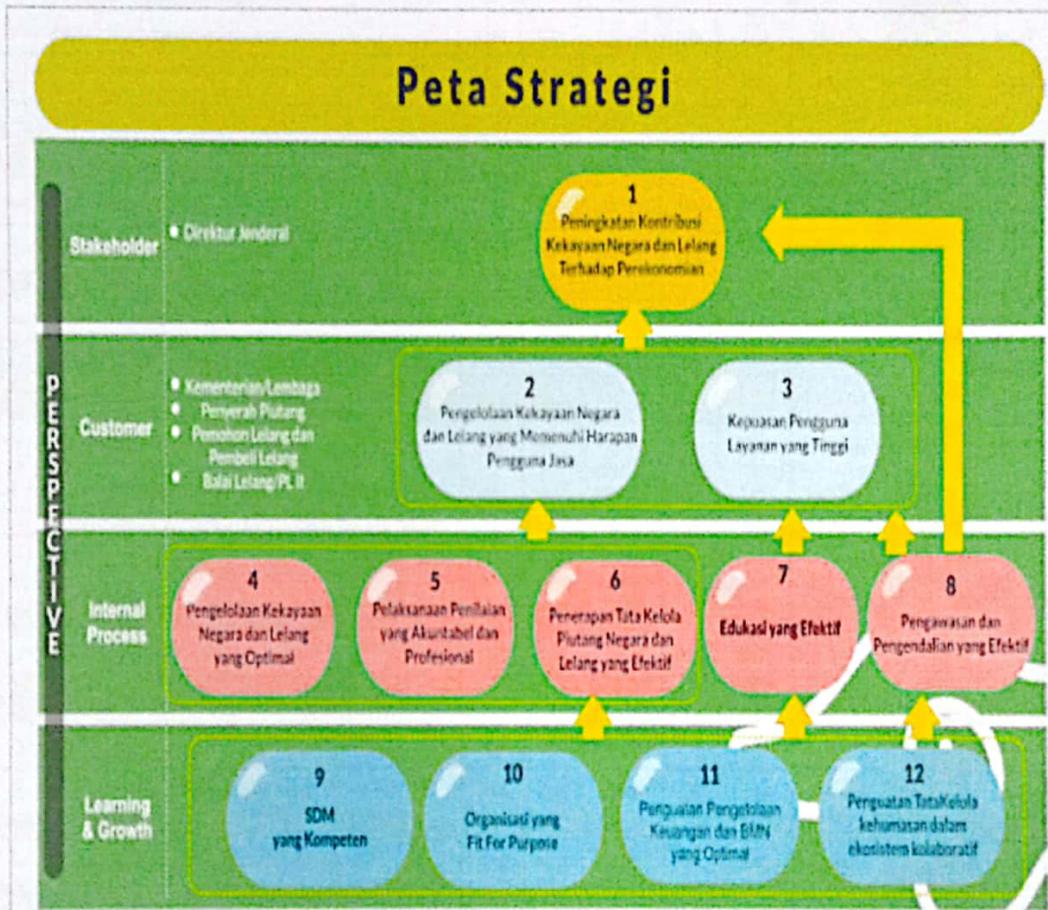
- a. Pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang kekayaan negara;
- b. Pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang penilaian;
- c. Pemberian bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengurusan piutang negara;
- d. Pemberian bahan pertimbangan atau usul penghapusan, keringanan hutang, pencegahan, paksa badan, atau penyelesaian piutang negara;
- e. Pemberian bimbingan teknis pengelolaan barang jaminan dan pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak diketemukan milik penanggung hutang atau penjamin hutang;
- f. Pemberian bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, evaluasi dan verifikasi lelang serta pengembangan lelang;
- g. Pemberian pelayanan bantuan hukum dibidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
- h. Pemberian bimbingan teknis pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan pelayanan informasi serta pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- i. Pembinaan terhadap Penilai, Usaha Jasa Lelang dan Profesi Pejabat Lelang;
- j. Pelaksanaan Pengawasan teknis pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang;
- k. Pelaksanaan penilaian dan pengurusan piutang negara;
- l. Pelaksanaan administrasi kantor wilayah.

Untuk mengukur kinerjanya Kanwil DJKN DKI Jakarta menerapkan sistem *Balance Scorecard* (BSC). BSC merupakan alat yang efektif untuk perencanaan strategis, alat untuk menterjemahkan misi, visi, tujuan, keyakinan dasar, nilai dasar, dan strategi organisasi ke dalam rencana tindakan (*action plans*) yang komprehensif, koheren, terukur, dan berimbang. Sebagai pengukuran kinerja, BSC mengukur penilaian kinerja berdasarkan IKU yang telah disusun dan

ditetapkan untuk tercapainya sasaran strategis dan tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Peta Strategis.

Sasaran strategis dan IKU *Kemenkeu-Two* Kanwil DJKN DKI Jakarta sebagai berikut :

Peta Strategi Kanwil DJKN DKI Jakarta



Tahun 2022 Kanwil DJKN DKI Jakarta berhasil menyelesaikan kinerjanya dengan baik sebagaimana yang telah ditetapkan. Dari 20 IKU *Kemenkeu-Two*, sebanyak 19 IKU, realisasinya dapat tercapai dan/atau melampaui dari target yang sudah ditetapkan. Selanjutnya 1 IKU, realisasinya 95,85% dari target. Rincian target dan realisasi IKU *Kemenkeu-Two* tersaji sebagai berikut.

Tabel Target dan Realisasi IKU Kemenkeu-Two Kanwil DJKN DKI Jakarta

Kode	IKU	V/C	Target Q4	Realisasi Q4	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Keterangan
	Stakeholder Perspective(25%)							30,00%	
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian							120,00%	
1a-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	P/M	100%	169,18%	14%	33%	169,18%	120,00%	hijau
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	36%	60,16%	14%	33%	167,10%	120,00%	hijau
1c-N	Tingkat keberhasilan joint program pelaksanaan RCE dan pengembangan UMKM	P/M	80%	100,00%	14%	33%	125,00%	120,00%	hijau
	Customer Perspective(15%)							16,13%	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							113,15%	
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	P/M	100%	106,30%	14%	50%	106,30%	106,30%	hijau
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	P/M	100%	141,80%	14%	50%	141,80%	120,00%	hijau
	3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi						101,92%	
3a-N	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL	E/M	4,69	4,78	21%	100%	101,92%	101,92%	hijau
	Internal Process Perspective (30%)							33,96%	
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							117,59%	
4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	P/M	65%	123%	14%	24%	188,89%	120,00%	hijau
4b-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	P/L	100%	116,31%	19%	33%	116,31%	116,31%	hijau
4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	P/M	100%	125,91%	14%	24%	125,91%	120,00%	hijau
4d-N	Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	P/H	100%	113,69%	11%	19%	113,69%	113,69%	hijau
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							120,00%	
5a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	19%	2,89%	14%	100%	184,77%	120,00%	hijau
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							114,35%	
6a-N	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	P/M	92%	100,00%	14%	50%	108,70%	108,70%	hijau
6b-N	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	P/M	10%	1,03%	14%	50%	189,69%	120,00%	hijau
7	Edukasi yang Efektif							102,47%	
7a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	P/M	93,50	95,81	14%	100%	102,47%	102,47%	hijau
8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif							111,55%	
8a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	P/M	85%	111,25%	14%	50%	130,88%	120,00%	hijau
8b-N	Persentase rekomendasi hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti	P/M	97%	100,00%	14%	50%	103,09%	103,09%	hijau
	Learning & Growth Perspective (30%)							32,83%	
9	SDM yang Kompeten							115,86%	
9a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	100%	115,86%	14%	100%	115,86%	115,86%	hijau
10	Organisasi yang Fit For Purpose							120,00%	
10a-N	Nilai review pengelolaan kinerja	P/M	80	96,85	14%	100%	121,06%	120,00%	hijau
11	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal							95,85%	
11a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	95,5%	91,54%	14%	100%	95,85%	95,85%	kuning
12	Penguatan Tata Kelola Kehumasan dalam Ekosistem Kolaboratif							106,06%	
12a-N	Indeks Efektivitas ekosistem kehumasan	P/M	3,55	3,77	14%	100%	106,06%	106,06%	hijau
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)								112,92%	hijau



BAB I PENDAHULUAN

- Latar Belakang
- Tugas, Fungsi & Struktur Organisasi
- Peran Strategis Kanwil DJKN DKI Jakarta

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tanggal 6 November 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kanwil DJKN DKI Jakarta dituntut untuk melaksanakan dengan akuntabel, efektif, efisien, sesuai dengan prinsip-prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu wujud dari akuntabilitas tersebut adalah penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Kanwil DJKN DKI Jakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2022. Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta merupakan unit eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta berkedudukan di Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor 10 Jakarta.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tanggal 6 November 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang kekayaan negara;
- b. Pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang penilaian;
- c. Pemberian bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengurusan piutang negara;
- d. Pemberian bahan pertimbangan atau usul penghapusan, keringanan hutang, pencegahan, paksa badan, atau penyelesaian piutang negara;
- e. Pemberian bimbingan teknis pengelolaan barang jaminan dan pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak diketemukan milik penanggung hutang atau penjamin hutang;
- f. Pemberian bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, evaluasi dan verifikasi lelang serta pengembangan lelang;
- g. Pemberian pelayanan bantuan hukum dibidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
- h. Pemberian bimbingan teknis pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan pelayanan informasi serta pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- i. Pembinaan terhadap Penilai, Usaha Jasa Lelang dan Profesi Pejabat Lelang;
- j. Pelaksanaan Pengawasan teknis pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang;
- k. Pelaksanaan penilaian dan pengurusan piutang negara;
- l. Pelaksanaan administrasi kantor wilayah.

Adapun Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta terdiri dari:

1. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, protokol, tata usaha, dan rumah tangga, serta penatausahaan, pengamanan, pengawasan barang milik Negara di lingkungan kantor wilayah.

2. Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara

Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, akuntansi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan di bidang kekayaan Negara.

3. Bidang Penilaian

Bidang Penilaian mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi dan bimbingan terhadap Penilai serta pelaksanaan kegiatan di bidang penilaian sumber daya alam, properti, property khusus dan usaha.

4. Bidang Piutang Negara

Bidang Piutang Negara mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengurusan piutang Negara, pemberian bahan pertimbangan atas usul penghapusan piutang instansi pemerintah daerah, pencegahan bepercgian ke luar negeri, paksa badan atau penyelesaian piutang Negara, penyiapan bahan penetapan persetujuan/penolakan keringanan hutang, serta bimbingan teknis pengelolaan barang jaminan dan pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak diketemukan milik penanggung hutang atau penjamin hutang.

5. Bidang Lelang

Bidang Lelang mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis penggalian potensi, pemantauan, evaluasi, verifikasi, dan pengembangan lelang, dan bimbingan terhadap Profesi Pejabat Lelang, dan Jasa Lelang, serta pengawasan lelang.

6. Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi

Bidang Kepatuhan Internal dan Hukum dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan penyiapan bahan rencana kerja, rencana strategik, laporan akuntabilitas kinerja, dan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis, penanganan perkara dan pemberian pendapat hukum (*legal opinion*), serta perencanaan, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, dan pengawasan implementasi sistem aplikasi, penyajian informasi dan hubungan masyarakat

Struktur organisasi Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta dapat dilihat pada Bagan Organisasi di bawah ini.



Dalam menjalankan tugasnya, Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta yang merupakan instansi vertikal unit eselon II di bawah Ditjen Kekayaan Negara didukung oleh pegawai dari berbagai keahlian.

SDM Kanwil DJKN DKI Jakarta sesuai Pendidikan dan Gender

Pendidikan dan Gender	P	L	Σ
Strata 2	7	9	16
Strata 1 / Diploma IV	14	13	27
Diploma III	5	13	18
Diploma I	1	2	3
SLTA	5	1	6
SLTP	0	0	0
TOTAL	30	33	63

SDM Kanwil DJKN DKI Jakarta sesuai Usia dan Gender

Usia dan Gender	P	L	Σ
18 – 30 Tahun	2	3	5

31 – 40 Tahun	7	11	18
40 – 50 Tahun	11	16	27
> 50 Tahun	13	7	20
TOTAL	30	33	63

Rasio Jabatan dan Gender Kanwil DJKN DKI Jakarta

Rasio Jabatan dan Gender	P	L	Σ
Eselon II	0	1	1
Eselon III	4	2	6
Jafung Penilai Pemerintah	1	3	4
Jafung Pelelang	0	0	0
Jafung Penata Laksana Barang	0	1	1
Jafung Penata Keuangan APBN Mahir	0	1	1
Eselon IV	8	7	15
Pelaksana	23	20	43

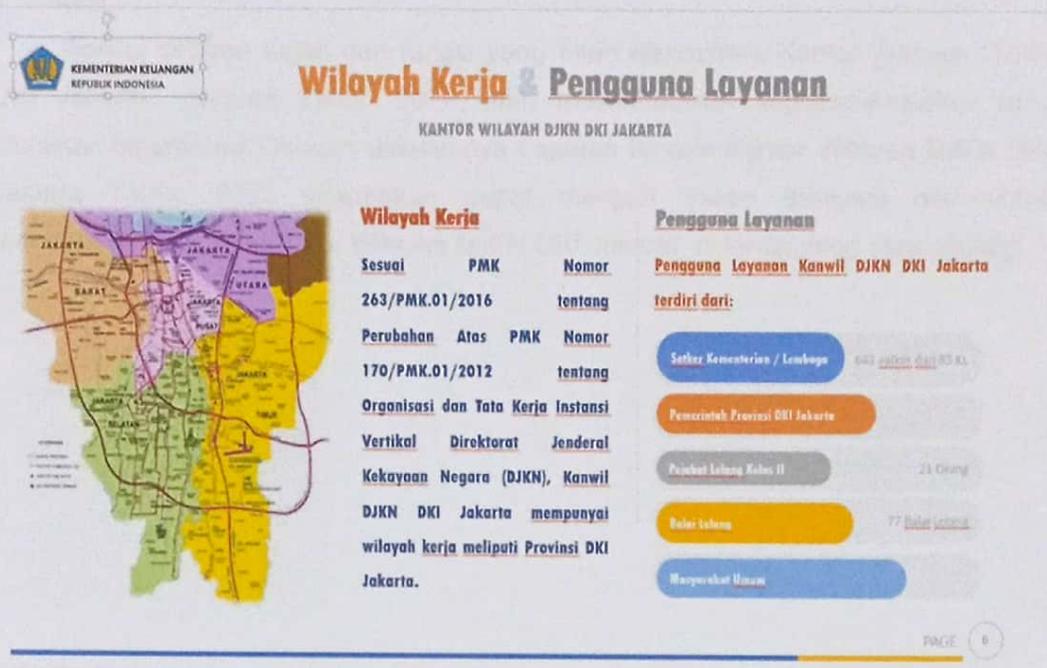
C. Peran Strategis Kanwil DJKN DKI Jakarta

Sebagai salah satu unit eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan, Kanwil DJKN DKI Jakarta mempunyai wilayah kerja meliputi Propinsi DKI Jakarta yang membawahi 5 (lima) Kantor Pelayanan, yaitu KPKNL Jakarta I, KPKNL Jakarta II, KPKNL Jakarta III, KPKNL Jakarta IV, dan KPKNL Jakarta V. Kanwil DJKN DKI Jakarta diberi tanggung jawab sebagai unit yang melayani bidang pengurusan piutang negara, pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang mempunyai peran strategis sebagai berikut:

- Memenuhi target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pengelolaan aset Barang Milik Negara, biaya administrasi pengurusan negara dan bea lelang;
- Membina, mengelola, menatausahakan, dan mengamankan aset negara berupa barang jaminan;
- Menyajikan dan melaporkan perkembangan hasil inventarisasi dan penilaian barang milik negara;
- Meningkatkan citra pengurusan piutang negara dan lelang;

- e. Membina dan mengawasi kinerja aparatur di lingkungan Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta.

Wilayah Kerja dan Pengguna Jasa Kanwil DJKN DKI Jakarta



D. Sistematika Laporan

Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta Tahun 2022 menggunakan Sistematika Laporan sebagai berikut:

1. Ikhtisar Eksekutif

Bagian ini menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, langkah-langkah antisipatif yang diambil.

2. Bab I. Pendahuluan

Bagian ini menguraikan penjelasan umum organisasi yang terdiri dari tugas, fungsi dan struktur organisasi dan peran strategis instansi Kanwil DJKN DKI Jakarta serta sistematika laporan.

3. Bab II. Perencanaan Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang perencanaan strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan penetapan kinerja.

4. Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang capaian kinerja organisasi, inisiatif strategis dan realisasi anggaran Kanwil DJKN DKI Jakarta tahun 2022.

5. Bab IV. Penutup

Bagian ini menguraikan tentang simpulan umum atas capaian organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta selama Tahun 2022 telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diuraikan laporan ini. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta Tahun 2022 diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan untuk meningkatkan kinerja Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta di tahun yang akan datang.



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- Perencanaan Strategis
- Penetapan / Perjanjian Kinerja
- Pengukuran Kinerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi ini. Berbagai teknik analisis dapat digunakan dalam proses ini, termasuk analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*), PEST (*Political, Economic, Social, Technological*), atau STEER (*Socio-cultural, Technological, Economic, Ecological, Regulatory*).

Perencanaan Strategis DJKN disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yaitu kementerian Negara/Lembaga yang memiliki instansi vertikal di daerah menetapkan entitas selaku koordinator penyusunan Laporan Kinerja satuan kerja di wilayah yang bersangkutan.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis DJKN yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor: 245/KN/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024. Rencana Strategis DJKN memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

Agar tetap eksis dan konsisten serta mempunyai arah yang jelas dalam menentukan langkah-langkah atau kebijakan-kebijakan yang diambil dalam menjalankan tugas-tugas pokok, Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta tetap mengacu pada Visi yang telah ditetapkan yaitu :

"Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan : Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat"

Sebagai wujud penjabaran dari Visi yang telah ditetapkan, Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta memiliki 5 (lima) misi yang harus diemban dan dilaksanakan, yaitu :

- a. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
- b. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;

- c. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
- d. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
- e. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategi organisasi sesuai tugas dan fungsi, maka perlu ditetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh Kantor Wilayah DJKN DKI merujuk pada tujuan yang hendak dicapai oleh DJKN untuk periode tahun 2020-2024 yaitu Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial, Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya, Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien, Birokrasi dan layanan publik DJKN yang agile, efektif, dan efisien.

Dalam mencapai tujuan tersebut, Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta telah menentukan sasaran strategis yang ingin dicapai. Sasaran merupakan penjabaran tujuan yang terukur dan telah ditetapkan secara spesifik serta dapat dicapai dalam jangka waktu satu tahun. Sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial, adalah :
 - a. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien, efektif, dan optimal.
 - b. Pengelolaan investasi pemerintah yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lainnya
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya adalah pengelolaan lelang yang optimal.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien adalah penilaian yang berkualitas.
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai tujuan Birokrasi dan layanan publik DJKN yang agile, efektif, dan efisien adalah:
 - a. Organisasi dan SDM yang optimal.
 - b. Pengawasan dan pengendalian yang bermilai tambah.
 - c. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi.
 - d. Komunikasi publik yang efektif.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut di atas, maka diperlukan strategi yang harus ditempuh oleh Kanwil DJKN DKI Jakarta. Strategi merupakan cara untuk

mencapai tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan organisasi. Strategi Kanwil DJKN DKI Jakarta yang akan ditempuh adalah :

1. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan kondisi pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien, efektif dan optimal adalah:
 - a. Rekonsiliasi dan pemutakhiran data piutang negara seluruh Kementerian/Lembaga.
 - b. Optimalisasi pengelolaan piutang negara;
 - c. Penguatan regulasi di bidang kekayaan negara melalui penyusunan RUU Pengelolaan Kekayaan Negara (Omnibus Law);
 - d. Penyederhanaan regulasi di bidang Pengelolaan BMN dengan tetap menjaga akuntabilitas;
2. Strategi yang dilakukan untuk mencapai pengelolaan lelang yang optimal adalah :
 - a. Pelaksanaan e-Auction yang mengakomodasi prinsip-prinsip ecommerce baik secara mandiri atau bekerja sama dengan perusahaan startup di bidang marketplace.
 - b. pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang lelang dengan kemampuan teknologi informasi yang andal dan modern.
3. Strategi yang dilakukan untuk mencapai penilaian yang berkualitas adalah :
 - a. pengembangan sistem informasi penilaian yang terintegrasi dengan instansi terkait secara nasional yang dapat digunakan dalam pengelolaan kekayaan negara.
 - b. Peningkatan kompetensi Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah.
4. Strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan Birokrasi dan layanan publik DJKN yang agile, efektif, dan efisien adalah :
 - a. Restrukturisasi dan penajaman tugas dan fungsi unit kerja DJKN.
 - b. Penguatan penyedia tenaga fungsional dan profesional bersertifikasi.
 - c. Pembentukan unit pengelola BMN Hulu Migas.
 - d. Transformasi digital manajemen aset dengan mewujudkan IT-Based Service Kekayaan Negara.
 - e. Pengembangan pusat data yang integratif dan andal untuk berbagai kepentingan.
 - f. Peningkatan kapabilitas tata kelola TIK DJKN.
 - g. penguatan unit kepatuhan internal di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
 - h. peningkatan kapabilitas dan tata kelola Kehumasan DJKN.

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta melaksanakan "Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang".

Sasaran Program (*outcome*): Terselenggaranya Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara, dan Pelayanan Lelang yang Profesional, Tertib, Tepat Guna, dan Optimal serta Mampu membangun Citra Baik bagi *stakeholder*.

Untuk mencapai program tersebut telah ditetapkan Indikator kinerja kegiatan yaitu: nilai kekayaan Negara yang diutilisasi, jumlah penerimaan Negara dari biaya administrasi pengurusan piutang Negara dan lelang, jumlah piutang Negara yang dapat diselesaikan (PNDS) dan pokok lelang, piutang Negara yang dapat diselesaikan dan Jumlah pokok lelang.

B. Penetapan/Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai indikator kinerja

Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Penetapan kinerja yang telah ditargetkan merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun. Gambaran penetapan kinerja Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta Tahun 2022 dijabarkan dalam 10 Sasaran Strategis (SS) yang dicapai melalui penetapan 20 target Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

PETA STRATEGI



Peta strategi Kantor Wilayah DJKN mempunyai 4 perspektif, yaitu: *stakeholders perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Dari peta strategi Kantor Wilayah DJKN Tahun 2021 tersebut terdapat 10 (sepuluh) Sasaran Strategis (SS) dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun keterkaitan antara sasaran strategis dan IKU dapat dilihat dalam tabel berikut:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DKI JAKARTA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

Sasaran Strategis	Kode IKU	Uraian Indikator Kinerja Utama (IKU)	TARGET
Stakeholder Perspective			
1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	1a - CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
	1b - CP	Persentase produktivitas lelang	36%
	1c - N	Tingkat keberhasilan joint program pelaksanaan RCE dan pengembangan UKM	80%

Customer Perspective			
2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a - CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%
	2b - CP	Persentase penurunan outstanding piutang negara	100%
3. Kepuasan Pengguna Layanan Yang Tinggi	3a - N	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL	4,69
Internal Process Perspective			
4. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Yang Optimal	4a - CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65%
	4b - CP	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	100%
	4c - CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%
	4d - N	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
5. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	5a - CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	19%
6. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	6a - N	Persentase Pelaksanaan Lelang EAuction dan E-Conventional Auction	92%
	6b - N	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	10%
7. Edukasi yang Efektif	7a - N	Tingkat efektifitas edukasi dan komunikasi	93,5
8. Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	8a - CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85%
	8b - N	Persentase rekomendasi hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti	97%
Learning and Growth Perspective			
9. SDM yang kompeten	9a - N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
10. Organisasi yang Fit-for-Purpose	10a - N	Nilai hasil review pengelolaan kinerja	80
11. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal	11a - CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%
12. Penguatan Tata Kelola Kehumasan Dalam Ekosistem Kolaboratif	12a - N	Indeks Efektivitas ekosistem kehumasan	3,55

C. PENGUKURAN KINERJA

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja tahun 2022, Kanwil DJKN DKI Jakarta berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/MK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran capaian kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%
2. Indeks capaian IKU dikonversikan menjadi maximize semua agar sebanding dengan yang lainnya
3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU
4. IKU yang ditetapkan, diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target
5. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120%;
 - b. Apabila realisasi pencapaiannya tidak sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi.



 KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- Capaian Kinerja Organisasi
- Realisasi Anggaran

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

a. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Kanwil DJKN DKI Jakarta tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja, diperoleh data bahwa capaian nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kanwil DJKN DKI Jakarta tahun 2022 sebesar 112,92%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut :

Nilai Kinerja Organisasi Kanwil DJKN DKI Jakarta

Perspektif	2021		2022	
	Bobot (%)	Nilai (%)	Bobot (%)	Nilai (%)
Stakeholder	25	29	25	30
Customer	15	15,68	15	16,13
Internal Process	30	31,39	30	33,96
Learning & Growth	30	33,62	30	32,83
TOTAL NKO		109,69		112,92

Catatan Status NKO :

$100 \leq x \leq 120$ = memenuhi ekspektasi

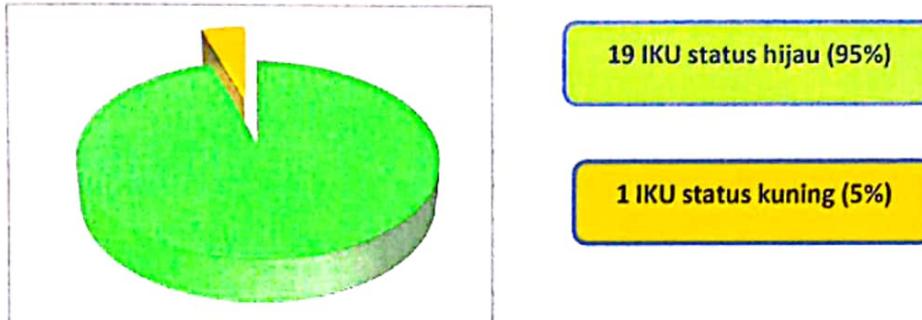
$80 \leq x < 100$ = belum memenuhi ekspektasi

$x < 80$ = tidak memenuhi ekspektasi

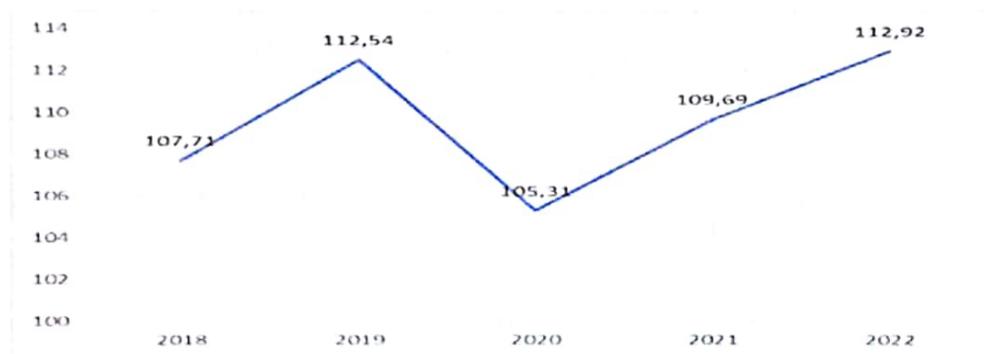
A. Capaian Indikator Kinerja Utama

Sebagaimana diketahui, pada tahun 2022 Kanwil DJKN DKI Jakarta telah menetapkan 10 (sepuluh) Sasaran Strategis (SS) dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU). Pengukuran capaian kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi

instansi pemerintah. Selama tahun 2021, Kanwil DJKN DKI Jakarta memiliki 20 IKU dengan 19 IKU berstatus hijau, 1 IKU berstatus kuning. Hasil pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Kanwil DJKN DKI Jakarta tahun 2022 dapat dilihat berikut :



Tren Kinerja NKO Kanwil DJKN DKI Jakarta



Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

Kode	IKU	V/C	Target Q4	Realisasi Q4	Indeks Max. 120%	Keterangan
	Stakeholder Perspective(25%)				30,00%	
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal				120%	
1a-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	P/M	100%	169,18%	120,00%	hijau
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	36%	60,16%	120,00%	hijau
1c-N	Tingkat keberhasilan joint program pelaksanaan RCE dan pengembangan UMKM	P/M	80%	100,00%	120,00%	hijau
	Customer Perspective(15%)				16,13%	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa				113,15%	

2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	P/M	100%	106,30%	106,30%	hijau
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	P/M	100%	141,80%	120,00%	hijau
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi				101,92%	
3a-N	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL	E/M	4,69	4,78	101,92%	hijau
	Internal Process Perspective (30%)				33,96%	
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal				117,59%	
4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	P/M	65%	123%	120,00%	hijau
4b-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	P/L	100%	116,31%	116,31%	hijau
4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	P/M	100%	125,91%	120,00%	hijau
4d-N	Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	P/H	100%	113,69%	113,69%	hijau
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional				120%	
5a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	19%	2,89%	120,00%	
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif				114,35%	
6a-N	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	P/M	92%	100,00%	108,70%	hijau
6b-N	Deviasi Data PNBFP Fungsional DJKN	P/M	10%	1,03%	120,00%	hijau
7	Edukasi yang efektif				102,47%	
7a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	P/M	93,50	95,81	102,47%	hijau
8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif				111,55%	
8a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	P/M	85%	111,25%	120,00%	8a-CP
8b-N	Persentase rekomendasi hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti	P/M	97%	100,00%	103,09%	8b-N
	Learning & Growth Perspective (30%)				32,83%	
9	SDM yang Kompeten				120%	
9a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	100%	120%	120%	hijau
10	Organisasi yang fit for purpose				120,00%	

10a-N	Nilai review pengelolaan kinerja	P/M	80	96,85	120,00%	hijau
11	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal				95,85%	
11a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	95,5%	91,54%	95,85%	Kuning
12	Penguatan Tata Kelola Kehumasan dalam Ekosistem Kolaboratif				106,06%	
12a-N	Indeks Efektivitas ekosistem kehumasan	P/M	3,55	3,77	106,06%	kuning
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)					112,92	Hijau

Sebagaimana tertera pada tabel diatas, pada tahun 2022 Kanwil DJKN DKI Jakarta berhasil memperoleh NKO 112,92% dimana capaian dengan nilai tersebut menandakan kinerja Kanwil DJKN DKI Jakarta pada tahun 2022 berhasil memenuhi ekspektasi organisasi.

Adapun hasil analisis terhadap pencapaian setiap Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal

Berdasarkan Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan barang milik negara (BMN), kekayaan negara dipisahkan (KND), kekayaan negara lain-lain (KNL), penilaian, piutang negara, dan lelang.

Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi:

1. Perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian atas BMN, KNL, dan KND;
2. Pengurusan piutang negara; dan
3. Pelayanan lelang.

Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila:

1. Seluruh BMN, KNL (Kekayaan Negara Lainnya), dan KND (Kekayaan Negara Dipisahkan) telah terutilisasi sesuai potensi tertinggi dan terbaiknya; dan
2. Pengelolaan BMN, KNL, KND, piutang negara, dan lelang mampu mendorong efektifitas, efisiensi, dan penerimaan negara.

Pengelolaan kekayaan Negara yang dilaksanakan oleh Kanwil DJKN DKI Jakarta meliputi pengelolaan barang milik negara dan pengelolaan kekayaan negara lain-lain. Pengelolaan Negara dikatakan optimal apabila seluruh aset dapat diutilisasi, dapat memberikan dampak positif bagi pengamanan aset Negara, dan dapat meningkatkan PNBPN.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kanwil DJKN DKI Jakarta mengidentifikasi 3 (tiga) IKU sebagai berikut:

SS Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
I	Pengelolaan kekayaan Negara dan Lelang yang optimal			120%
1a-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	169,18%	120%
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	36%	60,16%	120%
1c-N	Tingkat keberhasilan joint program pelaksanaan RCE dan pengembangan UMKM	80%	100,00%	120%

a. (1a-CP) IKU Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

1	-	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian			
	1a-CP	P/M	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	MAX/TLK	
			Jumlah target/realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	Rp	476.659.745.697 Rp 806.401.255.012
			Kanwil DJKN DKI Jakarta	Rp	50.000.000.000 Rp 35.412.927.506
			KPKNL Jakarta I	Rp	91.622.000.000 Rp 180.314.391.845
			KPKNL Jakarta II	Rp	141.139.500.000 Rp 292.420.641.833
			KPKNL Jakarta III	Rp	59.812.000.000 Rp 98.941.607.950
			KPKNL Jakarta IV	Rp	54.589.500.000 Rp 96.011.326.001
			KPKNL Jakarta V	Rp	79.496.745.697 Rp 103.300.359.877
				Rp	-
			Capaian IKU		169,18%

Isu Utama

1. Target akan dipastikan meningkat
2. Rendahnya kualitas BKPN
3. Masih tingginya jumlah pelaksanaan lelang TAP, dikarenakan daya beli masyarakat yang belum stabil sehingga berdampak terhadap perekonomian
4. Pandemi covid-19 yang sampai saat ini masih berlangsung walaupun pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sudah

dilonggarkan oleh Pemerintah tetapi kegiatan perekonomian masih belum pulih

Implikasi

1. Kondisi Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan penurunan kemampuan debitur dan proses pengurusan Piutang Negara.
2. Rendahnya kualitas BKPN mengakibatkan BKPN tidak tertagih
3. Target akan dipastikan meningkat, sehingga potensi PNBPN harus digali lebih dalam

Akar Masalah

1. Rendahnya kualitas BKPN yang diterima dari K/L karena umur piutang yang sudah lama, tidak didukung barang jaminan, keberadaan debitur tidak diketahui, dokumen yang tidak lengkap
2. Kondisi Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan penurunan kemampuan pembayaran oleh debitur selain itu berdampak pada proses pengurusan seperti penyampaian Surat Paksa, penilaian barang jaminan, pemeriksaan maupun penelitian lapangan.

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Melakukan pembinaan terhadap KPKNL
2. Melakukan koordinasi dengan PNKNL mengenai bimbingan dan pembinaan di KPKNL (Rapat Bimbingan Teknis).
3. Melakukan One on One Meeting dengan KPKNL di Lingkungan Kanwil DJKN DKI Jakarta.
4. Menerbitkan Surat Paksa
5. Melaksanakan rapat PUPN
6. Menetapkan nilai limit barang jaminan yang akan dijual lelang.
7. Melaksanakan monitoring Crash Program Keringanan Utang (CPKU)
8. Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi dengan PL II dan Balai Lelang di wilayah kerja Kanwil DJKN DKI Jakarta
9. Penyampaian apresiasi kepada PT. Pegadaian (Persero) dengan telah tercapainya PNBPN Lelang Pegadaian
10. Rapat Bimbingan Teknis dengan KPKNL Jakarta I sd. KPKNL Jakarta V mengenai Pembuatan/penyusunan serta penatausahaan risalah lelang.

Perbandingan Capaian IKU

Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	Target	Realisasi
2021	100%	135,97%
2022	100%	169,18%

b. (1b-CP) IKU Persentase Produktivitas Lelang

1b CP	P/M	Persentase produktivitas lelang	MAX/TLK	
		Jumlah frekuensi lelang laku secara keseluruhan		4774
		Kanwil DJKN DKI Jakarta		1260
		KPKNL Jakarta I		502
		KPKNL Jakarta II		1057
		KPKNL Jakarta III		913
		KPKNL Jakarta IV		500
		KPKNL Jakarta V		542
a		Jumlah frekuensi lelang secara keseluruhan		7936
		Kanwil DJKN DKI Jakarta		1326
		KPKNL Jakarta I		1104
		KPKNL Jakarta II		1635
		KPKNL Jakarta III		1734
		KPKNL Jakarta IV		931
		KPKNL Jakarta V		1206
		% Lelang laku keseluruhan		60,16%

Isu Utama

Masih terdapat pelaksanaan lelang yang TAP (Tidak Ada Penawaran) dan dibatalkan oleh pemohon

Implikasi

Kurang maksimalnya capaian produktivitas lelang

Akar Masalah

Dalam pelaksanaan lelang Eksekusi UUHT Pasal 6, Kreditur mengajukan permohonan lelang sebagai salah satu strategi agar debitur segera melakukan pembayaran/pelunasan terhadap objek lelang

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Imbauan kepada stakeholder untuk mengupayakan objek lelang yang diusulkan telah free & clear.
2. Menghimbau kepada stakeholder untuk lebih optimal dalam pemasaran dan/atau menemukan peminat yang potensial sehingga objek lelang yang ditawarkan agar lelang yang dilaksanakan optimal.

Rekomendasi Rencana Aksi

Menyampaikan kepada KPKNL/PL2 untuk menghimbau pada Stakeholder agar lelang yang diusulkan free & clear, dan melakukan upaya pemasaran sebelum diusulkan lelang

Perbandingan Capaian IKU

Persentase produktivitas lelang	Target	Realisasi
2022	35%	60,16%
2021	35%	58,48%

c. (1c-CP) IKU Tingkat keberhasilan joint program pelaksanaan RCE dan pengembangan UMKM

IKU ini merupakan IKU yang baru ditetapkan tahun 2022, IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan joint program pelaksanaan RCE dan pengembangan UMKM.

1c-N	PIM	Tingkat keberhasilan joint program pelaksanaan RCE dan pengembangan UMKM	MAX/TUK	
		Kanwil DJKN DKI Jakarta		
		Jumlah Target/Realisasi Tingkat keberhasilan joint program pelaksanaan RCE dan pengembangan UMKM	80%	100,00%

2. Sasaran Strategis : Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

SS . Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa			113,15%	
	2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	106,30%	106,30%
	2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%	141,80%	120%

a. (2a-CP) Persentase Realisasi Pokok Lelang

2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa			
	Za CP	P/M	Persentase Realisasi Pokok Lelang	Rp 9.050.000.000.000 Rp 9.620.102.543.336
			Kanwil DJKN DKI Jakarta	Rp 6.588.000.000.000 Rp 5.919.337.615.964
			KPKNL Jakarta I	Rp 468.000.000.000 Rp 695.091.348.092
			KPKNL Jakarta II	Rp 416.000.000.000 Rp 473.592.657.173
			KPKNL Jakarta III	Rp 433.000.000.000 Rp 788.373.045.056
			KPKNL Jakarta IV	Rp 400.000.000.000 Rp 905.346.182.325
			KPKNL Jakarta V	Rp 745.000.000.000 Rp 838.361.700.706
			Capaian IKU	106,30%

Isu Utama

1. Banyaknya jumlah pelaksanaan lelang TAP, dikarenakan pandemi Covid 19 yang berdampak terhadap perekonomian yang belum stabil
2. Potensi PL Kelas II berasal dari lelang kendaraan

Implikasi

Ada kebijakan tidak kena pajak untuk pembelian mobil baru, sehingga lelang mobil bekas menurun karena pembeli lebih tertarik untuk membeli mobil baru.

Akar Masalah

Apabila tahun 2022 masih terjadi pelaksanaan lelang tetapi TAP maka kemungkinan target yang telah ditetapkan oleh kantor pusat tidak akan tercapai atau sama dengan capaian tahun sebelumnya

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi dengan PL II dan Balai Lelang di wilayah kerja Kanwil DJKN DKI Jakarta
2. Penyampaian apresiasi kepada PT. Pegadaian (Persero) dengan telah tercapainya PNBPN Lelang Pegadaian
3. Rapat Bimbingan Teknis dengan KPKNL Jakarta I sd. KPKNL Jakarta V mengenai Pembuatan/penyusunan serta penatausahaan risalah lelang
4. Pelaksanaan Lelang pada saat ini dilakukan secara online dikarenakan adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) untuk meminimalisir penyebaran covid 19 di wilayah DKI Jakarta

Rekomendasi Rencana Aksi

1. Memonitor pelaksanaan lelang TAP dengan menghimbau kepada stakeholder untuk lebih mengoptimalkan pemasaran
2. Melaksanakan rapat koordinasi dengan stakeholder

3. Melakukan Bimbingan Teknis kepada KPKNL

Perbandingan Realisasi IKU Persentase Hasil Lelang

	Target		Realisasi	
	%	Rp	%	Rp
2019	100%	7.967.704.000.000	102,74	8.091.133.603.566
2020	100%	8.327.583.000.000	106,13	8.838.088.259.376
2021	100%	8.983.000.000.000	113,24	10.172.471.116.741
2022	100%	9.050.000.000.000	106,3	9.620.102.549.336

b. (2b-CP) Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara

Zb-CP	P/M	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	MAX/TLK	
		Target Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	Rp 2.391.159.212.641	Rp 3.390.579.174.477
		KPKNL Jakarta I	Rp 341.159.212.641	Rp 698.862.767.053
		KPKNL Jakarta II	Rp 375.000.000.000	Rp 393.014.654.147
		KPKNL Jakarta III	Rp 500.000.000.000	Rp 606.292.254.636
		KPKNL Jakarta IV	Rp 175.000.000.000	Rp 338.319.766.699
		KPKNL Jakarta V	Rp 1.000.000.000.000	Rp 1.354.089.711.921
Capaian IKU				141,80%

Isu Utama

1. Target Penurunan Outstanding Piutang Negara sebesar Rp2.391.159.212.641,- Tingkat Penurunan Outstanding Piutang Negara diperoleh dari penurunan outstanding piutang negara yang SP3N-nya dibuat hingga 31 Desember 2017 atau sebelumnya.
2. Pandemi Covid-19 yang belum berakhir

Implikasi

Penurunan kemampuan debitur dan proses pengurusan Piutang Negara

Akar Masalah

1. Rendahnya kualitas BKPN yang diterima dari K/L karena umur piutang yang sudah lama, tidak didukung barang jaminan, keberadaan debitur tidak diketahui, dokumen yang tidak lengkap
2. Kondisi Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan penurunan kemampuan pembayaran oleh debitur selain itu berdampak pada proses pengurusan seperti penyampaian Surat Paksa, penilaian barang jaminan, pemeriksaan maupun penelitian lapangan.

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Melakukan pembinaan terhadap KPKNL melalui surat dan bimbingan teknis dalam pengurusan piutang Negara .
2. Melakukan usulan pencegahan terhadap Debitur .
3. Melakukan koordinasi dengan PNKNL mengenai bimbingan dan pembinaan di KPKNL (Rapat Bimbingan Teknis).
4. Pelantikan anggota PUPN dari unsur Kepolisian, Kejaksaan dan Pemda.
5. Melakukan monitoring evaluasi dan akurasi basis data bidang Piutang Negara.
6. Melakukan monitoring Pengurusan Piutang Negara Debitur High Profile.
7. Mencetak dan memasang umbul-umbul, banner dan brosur.
8. Menyampaikan surat kepada semua satker tingkat Kanwil.
9. Melakukan One on One Meeting dengan KPKNL di Lingkungan Kanwil DJKN DKI Jakarta.
10. Menerbitkan Surat Paksa.
11. Menetapkan nilai limit barang jaminan yang akan dijual lelang.
12. Melaksanakan monitoring Crash Program Keringanan Utang (CPKU).
13. Melaksanakan rapat PUPN

Rekomendasi Rencana Aksi

1. Membuat daftar BKPN potensial dengan melakukan mapping BKPN dalam rangka mencari sumber capaian One on One Meeting dengan KPKNL.
2. Melakukan bimbingan teknis ke KPKNL terkait monitoring dan evaluasi kinerja KPKNL, potensi debitur besar di KPKNL

Perbandingan Capaian IKU

Tingkat Penurunan Outstanding Piutang Negara	Target	Realisasi
2022	100%	141,8%
2021	100%	118,78%

3. Sasaran Strategis : Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi

SS . Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
3	Kepuasan Pengguna Layanan Yang Tinggi			101.92%
3a-N	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL	4,69	4,78	101.92%

3a-N Indeks kepuasan pengguna layanan Kanwil dan KPKNL

3a-N	E/M	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL	MAX/TLK	
		Target/Realisasi (rata-rata KPKNL dan Kanwil)	4,69	4,78
		Kanwil DJKN DKI Jakarta	4,67	4,89
		KPKNL Jakarta I	4,65	4,77
		KPKNL Jakarta II	4,66	4,72
		KPKNL Jakarta III	4,65	4,77
		KPKNL Jakarta IV	4,75	4,76
		KPKNL Jakarta V	4,75	4,76
		Capaian IKU	-	4,78

Isu Utama

1. Pengukuran dilakukan pada akhir tahun
2. Adanya pembatasan mobilisasi pegawai dan penugasan secara Work From Home, serta penerimaan surat yang tidak dapat berproses seperti SOP yang berjalan selama ini.

Implikasi

Jeda waktu yang terlalu jauh antara waktu pelayanan yang diterima pengguna jasa dengan pelaksanaan survei, terutama untuk pelayanan yang diterima di awal tahun

Akar Masalah

1. Pengguna jasa menuntut pelayanan tercepat
2. Pengguna jasa enggan mengisi kuesioner
3. Pengguna jasa lupa terhadap pelayanan yang pernah diterima

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Penugasan Work From Home tetap dilakukan dengan upaya untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada pengguna jasa (penyelesaian pekerjaan sesuai SOP).
2. Terus melakukan komunikasi dengan pihak yang mengajukan permohonan pengelolaan BMN untuk dapat melakukan tracing dokumen usulan yang diterima Satpam dan progres terakhir dari surat tersebut.

Rekomendasi Rencana Aksi

1. Memberikan layanan kepada stakeholder dengan berpedoman pada nilai-nilai Kementerian Keuangan dan SOP layanan Pengelolaan Kekayaan Negara.
2. Meminta masukan kepada stakeholder untuk meningkatkan layanan Pengelolaan Kekayaan Negara.
3. Menjaga komunikasi dan hubungan yang baik dan sinergis dengan stakeholder.

Perbandingan IKU Kepuasan Pengguna Layanan pada Kanwil dan Kantor Pelayanan

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan pada Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan	Target	Realisasi
2022	4,69	4,78
2021	4,69	4,74
2020	4,66	4,71
2019	4,65	4,68
2018	4,53	4,65

4. Sasaran Strategis : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Yang Optimal			117,59%
4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65%	123%	120,00%
4b-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	100%	116,31%	116,31%
4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%	125,91%	120,00%
4d-N	Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	100%	113,69%	113,69%

a. (4a-CP) Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK

4a-CP	P/M	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	MAX/TLK	
		Target tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65%	122,78%
		KPKNL Jakarta I	65%	128,65%
		KPKNL Jakarta II	65%	114,30%
		KPKNL Jakarta III	65%	122,74%
		KPKNL Jakarta IV	65%	124,63%
		KPKNL Jakarta V	65%	123,37%
Capaian IKU				122,78%

Isu Utama

Semua IKU dapat tercapai

Implikasi

Tingkat kesesuaian menunjukkan tren penurunan, dikhawatirkan kuantitas penyampaian form 100%, tetapi tingkat kesesuaian masih rendah

Akar Masalah

Target NUP sudah ditetapkan sehingga tidak ada pilihan

Tindakan yang telah dilaksanakan

Kanwil DJKN DKI Jakarta telah melaksanakan koordinasi mingguan secara informal dengan Kasi PKN KPKNL

Rekomendasi Rencana Aksi

1. Melanjutkan validasi hasil verifikasi pelaksanaan perhitungan SBSK dari KPKNL.
2. Melakukan koordinasi dengan KPKNL agar membuat rencana kerja survei penghitungan SBSK dan melaporkan satker yang sudah dan belum memenuhi target SBSK 62%.
3. Melakukan monitoring tiap bulan terhadap capaian penyelesaian perhitungan SBSK dan melakukan evaluasi terhadap hasil SBSK-nya.
4. Usulan revisi target NUP K/L untuk SBSK.

Perbandingan Capaian IKU

Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	Target	Realisasi
2021	62%	68,83%
2022	65%	123%

b. (4b-CP) Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan

4b-CP	P/I	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	MAX/TLK	
		YPPNL Jakarta I	718	718
		YPPNL Jakarta II	139	151
		YPPNL Jakarta III	169	221
		YPPNL Jakarta IV	69	180
		YPPNL Jakarta V	309	363
Jumlah target/realisasi bidang tanah yang telah disertifikatkan			1.404	1.633
Capaian IKU			-	116,31%

Isu Utama

1. Kantah mulai bergerak aktif diakhir-akhir tahun

Implikasi

1. Target Sertifikasi 2022 tidak tercapai

Akar Masalah

Sertifikasi BMN Bukan menjadi prioritas utama bagi Kantor Pertanahan

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Telah dilaksanakan rapat pembahasan kinerja dengan seluruh seksi PKN pada KPKNL dan Koordinator Sertifikasi Kantor Pertanahan dengan salah satu pokok bahasan mengenai upaya dan strategi KPKNL dalam percepatan pencapaian target IKU pada tahun 2021, bahkan hamper ditiap minggu pada Bulan Desember
2. Monev dengan masing-masing Kantor Pertanahan dan satuan kerja pemohon telah dilaksanakan

Rekomendasi Rencana Aksi

1. Berkoordinasi dengan Direktorat BMN, Kanwil BPN, KPKNL Jakarta I s/d V, Kantah se DKI Jakarta, dan Satker yang menjadi target sertifikasi tahun 2022 sehingga mempunyai langkah kerja yang sama.
2. Memastikan target sertifikasi clean dan clear. dan dapat dilengkapi persyaratannya. Apabila ada permasalahan dan hambatan segera dilakukan penggantian target untuk menjaga pencapaian target.
3. Memonitor dan mengevaluasi progres sertifikasi secara bulanan dengan kunjungan KPKNL atau Kantor pertanahan maupun melalui WA grup Sertifikasi.
4. Meminta KPKNL agar para satkernya dapat memutakhirkan data SIMANTAP

Perbandingan Capaian IKU

Persentase Bidang Tanah yang Disertifikatkan	Target	Realisasi
2022	1.404	1.633
2021	180	156
2020	2	6
2019	44	49
2018	31	50

c. (4c-CP) Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)

4c-CP	P/M	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	MAX/TIK	
		KPKNL Jakarta I	40	75
		KPKNL Jakarta II	1500	2235
		KPKNL Jakarta III	800	855
		KPKNL Jakarta IV	800	856
		KPKNL Jakarta V	600	738
		Target/Realisasi Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	3.740	4775
Capaian IKU				125,91%

Isu Utama

1. Target BKPN Selesai 3740
2. Rendahnya kualitas BKPN

Implikasi

1. Rendahnya kualitas BKPN mengakibatkan BKPN tidak tertagih
2. Kondisi Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan penurunan kemampuan debitur dan proses pengurusan Piutang Negara

Akar Masalah

1. Rendahnya kualitas BKPN yang diterima dari K/L karena umur piutang yang sudah lama, tidak didukung barang jaminan, keberadaan debitur tidak diketahui, dokumen yang tidak lengkap.
2. Kondisi Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan penurunan kemampuan pembayaran oleh debitur selain itu berdampak pada proses pengurusan seperti penyampaian Surat Paksa, penilaian barang jaminan, pemeriksaan maupun penelitian lapangan

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Melakukan pembinaan terhadap KPKNL melalui surat dan bimbingan teknis dalam pengurusan piutang Negara
2. Melakukan koordinasi dengan PNKNL mengenai bimbingan dan pembinaan di KPKNL (Rapat Bimbingan Teknis).
3. Melakukan One on One Meeting dengan KPKNL di Lingkungan Kanwil DJKN DKI Jakarta.

Rekomendasi Rencana Aksi

1. Membuat daftar BKPN potensial dengan melakukan mapping BKPN dalam rangka mencari sumber capaian.
2. One on One Meeting dengan KPKNL
3. Melakukan bimbingan teknis ke KPKNL terkait monitoring dan evaluasi kinerja KPKNL, potensi debitur besar di KPKNL

Perbandingan Capaian IKU

Persentase efektivitas penyelesaian BKPN	Target	Reallsasi
2021	100%	94,71%
2022	100 %	125,1%

d. (4d-N) Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)

4d-N	P/H	Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	MAX/TLK	
		KPKNL Jakarta I	50	50
		KPKNL Jakarta II	50	60
		KPKNL Jakarta III	50	50
		KPKNL Jakarta IV	50	107
		KPKNL Jakarta V	50	50
		Target/Realisasi Evaluasi Kinerja BMN	250	317
		KPKNL Jakarta I	347	349
		KPKNL Jakarta II	750	760
		KPKNL Jakarta III	259	259
		KPKNL Jakarta IV	360	360
		KPKNL Jakarta V	349	349
		Target/Realisasi Penyusunan dan Pencapaian Rekomendasi	2065	2077
		TOTAL	2315	2394
		Capaian IKU	-	113,69%

Isu Utama

Larangan aktifitas di tempat umum karena mewabahnya Virus Corona (Covid-19).

Implikasi

Kendala peninjauan ke lapangan

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Melakukan monitoring progress pelaksanaan evaluasi kinerja BMN (Portofolio) melalui melalui aplikasi SIMAN Portofolio <http://10.10.5.53:8081/simanportofolio>
2. Melakukan koordinasi pelaksanaan evaluasi kinerja BMN (Portofolio) dengan KPKNL

Rekomendasi Rencana Aksi

1. Melakukan monitoring progress pelaksanaan evaluasi kinerja BMN (Portofolio)
2. Melakukan koordinasi pelaksanaan evaluasi kinerja BMN (Portofolio)

Perbandingan Capaian IKU

Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	Target	Realisasi
2021	100%	105,67%
2022	100%	113,69%

5. Sasaran Strategis : Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

SS . Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional			120%
5a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	19%	2,89%	120%

(5a-CP) Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

5 Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional				
5a-CP	P/M	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
		Deviasi ketergunaan hasil penilaian	19%	2,89%
		Kanwil DJKN DKI Jakarta	19%	
		KPKN Jakarta I	19%	4,35%
		KPKN Jakarta II	19%	0,57%
		KPKN Jakarta III	19%	2,21%
		KPKN Jakarta IV	19%	0,04%
		KPKN Jakarta V	19%	7,30%
		Target/Realisasi Deviasi ketergunaan hasil penilaian	19%	2,89%
		Capaian IKU		2,89%

Isu Utama

Mengukur deviasi dari nilai hasil penilaian dalam pengambilan keputusan pengelolaan BMN.

Implikasi

Mengikuti pola saat ini, dimana nilai yang dipakai adalah mana yang lebih tinggi antara usulan penilai pada permohonan atau nilai hasil penilaian. Permasalahan timbul apabila nilai usulan di permohonan satker lebih tinggi dari nilai hasil penilaian

Akar Masalah

Satker tidak memiliki kemampuan yang mumpuni dalam menentukan harga taksiran.

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Rekapitulasi daftar kegiatan penilaian yang telah dilakukan dengan disertai nilai wajar hasil penilaian
2. Berkoordinasi secara informal dan formal melalui Nota Dinas dengan Direktorat PKNSI dan Bidang PKN Kanwil DJKN DKI Jakarta terkait nilai persetujuan pemanfaatan maupun pemindahtanganan BMN setiap bulan.
3. Penilai memperhatikan nilai usulan dalam permohonan untuk mereview hasil penilaian.

Rekomendasi Rencana Aksi

Memberikan edukasi kepada satker saat pelaksanaan survei lapangan sehingga satker memiliki pengetahuan dasar dalam mengajukan nilai taksiran

Perbandingan Capaian IKU

Deviasi ketergunaan hasil penilaian	Target	Realisasi
2021	22%	4,47%
2022	19%	2,89%

6. Sasaran Strategis : Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif

SS Penerapan tata kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
6	Penerapan tata kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif			114,35%
6a-N	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	92%	100,00%	108,70%
6b-N	Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	10%	1,03%	120,00%

a. (6a-N) Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction

6a-N	P/M	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	MAX/TLK	
		Jumlah realisasi Frekuensi e-Auction		4.351
		KPKNL Jakarta I		1.104
		KPKNL Jakarta II		1.037
		KPKNL Jakarta III		851
		KPKNL Jakarta IV		583
		KPKNL Jakarta V		776
		Jumlah realisasi Frekuensi e-Conventional Auction		8
		KPKNL Jakarta I		
		KPKNL Jakarta II		
		KPKNL Jakarta III		8
		KPKNL Jakarta IV		
		KPKNL Jakarta V		
		Capaian realisasi e-Auction		99,82%
		Capaian Realisasi e-Conventional Auction		0,18%
		Jumlah Target/Realisasi pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	92%	4359
		Capaian IKU		100,00%

Isu Utama

Semua pelaksanaan lelang telah dilaksanakan secara e-auction dan e-conventional auction

Implikasi

Sampai dengan triwulan IV capaian IKU maksimal yaitu 100%

Tindakan yang telah dilaksanakan

Menghimbau kepada stakeholder yang masih melaksanakan lelang konvensional untuk segera beralih ke lelang e-auction dan e-konvensional auction

Rekomendasi Rencana Aksi

Menghimbau kepada KPKNL untuk mewajibkan pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction.

Perbandingan Capaian IKU

Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	Target	Realisasi
2021	92%	100%
2022	92%	100%

b. (6b-N) Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN

6b-N	P/M	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	MIN/TLK	
		Kanwil DJKN DKI Jakarta	10%	0,00%
		KPKNL Jakarta I	10%	0,00%
		KPKNL Jakarta II	10%	1,30%
		KPKNL Jakarta III	10%	3,84%
		KPKNL Jakarta IV	10%	0,86%
		KPKNL Jakarta V	10%	0,20%
		Target/Realisasi Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	10%	1,03%
		Capaian IKU		1,03%

Isu Utama

1. Perbedaan data pada aplikasi SPAN dan Simponi
2. Sinkronisasi aplikasi SPAN dan Simponi yang membutuhkan waktu
3. Dibutuhkannya waktu yang tidak singkat untuk melakukan rekonsiliasi PNBP terlebih dahulu

Implikasi

Pada saat waktu pelaporan kinerja petugas harus selalu mengecek OMSPAN apabila ada update data

Akar Masalah

Aplikasi SPAN dan Simponi yang masih memerlukan pemutakhiran lebih lanjut sehingga menyebabkan proses sinkronisasi aplikasi SPAN dan Simponi mengalami trouble atau mengalami perbedaan data dalam beberapa waktu.

Tindakan yang telah dilaksanakan

Telah menyampaikan hasil rekonsiliasi PNBP s.d. Bulan Desember 2022 pada aplikasi SPAN dan Simponi sebagai monitoring sinkronisasi data PNBP antara aplikasi SPAN dan Simponi.

Rekomendasi Rencana Aksi

Agar pihak pengembang aplikasi dapat mengembangkan aplikasi Simponi menjadi update secara real time jika ada perbaikan rekonsiliasi PNBPN sehingga aplikasi Simponi dan SPAN dapat tersinkronisasi dengan baik

7. Sasaran Strategis : Edukasi yang efektif

SS Edukasi yang Efektif

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
7	Edukasi yang Efektif			102,47%
7a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	93,50	95,81	102,47%

7a-N Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi

7a-N	P/M	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	MAX/AVG	
		Kanwil DJKN DKI Jakarta	93,5	95,81
		Data Untuk Keperluan Monev Kanwil Pada Tiap KPKNL (Tidak Masuk Hitungan IKU)		
		KPKNL Jakarta I	93,00	
		KPKNL Jakarta II	93,00	
		KPKNL Jakarta III	93,00	
		KPKNL Jakarta IV	93,00	
		KPKNL Jakarta V	91,00	93,44
		Target/realisasi efektivitas edukasi dan komunikasi	93,50	95,81
		Capaian IKU	-	95,81

Isu Utama

Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi adalah gabungan dari edukasi kanwil ke pengguna jasa dan bimbingan teknis kanwil ke KPKNL, targetnya 93,5

Implikasi

Bimbingan ke KPKNL dan layanan kepada pengguna layanan harus ditingkatkan

Akar Masalah

1. Pengguna jasa enggan mengisi kuesioner
2. Bidang lelang tidak melaksanakan edukasi kepada pengguna layanan

Tindakan yang telah dilaksanakan

Pembinaan rutin ke KPKNL dan pengguna layanan baik melalui surat maupun virtual

Rekomendasi Rencana Aksi

1. Melakukan edukasi kepada pemangku kepentingan baik melalui surat, media sosial maupun workshop tertentu.

2. Melakukan bimbingan teknis baik melalui surat, workshop ataupun sosialisasi atau meeting/rapat lainnya dalam pengelolaan kekayaan negara kepada KPKNL.
3. Meminta masukan kepada KPKNL atas edukasi maupun komunikasi yang sudah dilakukan dalam meningkatkan kinerja KPKNL

Perbandingan Capaian IKU

Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	Target	Realisasi
2021	93,5	94,65
2022	93,5	95,81

8. Sasaran Strategis : Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif

SS Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif			111,55%
8a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85%	111,25%	120,00%
8b-N	Persentase rekomendasi hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti	97%	100,00%	103,09%

a. (8a-CP) Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan Negara

Ba-CP	P/M	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	MAX/TLK	
a		Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester II 2021 yang ditindaklanjuti oleh K/L		621
		Kanwil DJKN DKI Jakarta		5
		KPKNL Jakarta I		100
		KPKNL Jakarta II		210
		KPKNL Jakarta III		93
		KPKNL Jakarta IV		89
		KPKNL Jakarta V		124
		Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester I 2022 yang ditindaklanjuti oleh K/L		544
		Kanwil DJKN DKI Jakarta		2
		KPKNL Jakarta I		75
		KPKNL Jakarta II		226
		KPKNL Jakarta III		82
		KPKNL Jakarta IV		89
		KPKNL Jakarta V		70
b		Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester I 2021		664
		Kanwil DJKN DKI Jakarta		6
		KPKNL Jakarta I		102
		KPKNL Jakarta II		225
		KPKNL Jakarta III		108
		KPKNL Jakarta IV		92
		KPKNL Jakarta V		131
		Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester I 2022		568
		Kanwil DJKN DKI Jakarta		2
		KPKNL Jakarta I		77
		KPKNL Jakarta II		231
		KPKNL Jakarta III		91
		KPKNL Jakarta IV		92
		KPKNL Jakarta V		75
Target/Realisasi Jumlah tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara			85%	94,56%
Capaian IKU			-	111,25%

Isu Utama

1. Target tindak lanjut pengelolaan aset tahun 2021 adalah sebesar 85%
2. Terhadap persetujuan yang telah diterbitkan, Satuan Kerja telah melakukan tindak lanjut persetujuan namun belum melakukan input persetujuan dan progres ke dalam aplikasi SIMAN

Implikasi

Pelaksanaan tindak lanjut oleh Satuan Kerja tidak terpantau

Akar Masalah

1. Aplikasi SIMAN belum update
2. Jumlah Satker yang cukup banyak di wilayah kerja Kanwil DJKN DKI Jakarta dan setiap Satker memiliki karakteristik pengelolaan BMN yang berbeda
3. Kesadaran Satker yang kurang dalam menindaklanjuti surat persetujuan

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Kanwil DJKN DKI Jakarta telah berkoordinasi dan memintakan secara langsung baik melalui surat maupun secara informal kepada Satuan Kerja untuk dapat menyampaikan laporan.
2. Terhadap persetujuan pengelolaan yang belum diinput dalam aplikasi SIMAN, Kanwil telah melakukan hal tersebut dengan bantuan rekan-rekan yang melaksanakan On Job Training

Rekomendasi Rencana Aksi

1. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN yang telah diterbitkan oleh Kanwil DJKN DKI Jakarta.
2. Melakukan koordinasi dengan satker atas tindak lanjut surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh Kanwil DJKN DKI Jakarta
3. Memonitor aplikasi SIMAN secara berkala untuk memastikan surat persetujuan pengelolaan BMN telah tuntas ditindaklanjuti. Apabila belum selesai ditindaklanjuti, diberikan surat peringatan.
4. Mengevaluasi persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset.

Perbandingan Capaian IKU

Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan Negara	Target	Realisasi
---	---------------	------------------

2021	85%	89,95%
2022	85%	111,25%

b. (8b-N) Persentase rekomendasi hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti

Sb-N	P/M	Persentase rekomendasi hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti	MAX/TLK	Realisasi
		Kanwil DJKN DKI Jakarta	97,00%	100,00%
		KPKNL Jakarta I		0,00%
		KPKNL Jakarta II		0,00%
		KPKNL Jakarta III	97,00%	100,00%
		KPKNL Jakarta IV		0,00%
		KPKNL Jakarta V		0,00%
		Target/Realisasi ..	97,00%	100,00%
Capaian IKU				100,00%

Isu Utama

Target tahun 2022 berasal dari KPKNL Jakarta III

Implikasi

Tindak lanjut atas rekomendasi harus terus dipantau dan dievaluasi melalui aplikasi teamcentral mengingat target ada di unit KPKNL

Akar Masalah

Aplikasi TeamCentral yang tidak user friendly

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi temuan secara rutin melalui aplikasi teamcentral
2. Berkoordinasi dengan Itjen, KPKNL Jakarta I, dan KPKNL Jakarta II

Rekomendasi Rencana Aksi

1. Membuat jadwal penyelesaian tindak lanjut hasil rekomendasi Pengawasan
2. Melakukan monitoring progres penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti

Perbandingan Capaian IKU

Persentase rekomendasi hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti	Target	Realisasi
2021	97%	100,00%
2022	97%	100%

9. Sasaran Strategis : SDM yang Kompeten

SS SDM yang Kompeten

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
----	-------------------------	--------	-----------	---------

9	SDM yang Kompeten			115,86%
9a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	115,86%	115.86%

(9a – N) Persentase pengembangan kompetensi pegawai

9	SDM yang Kompeten			
9a-N	P/M	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	MAX/TLK	
		Satker Kanwil		
a		Jumlah bawahan yang memenuhi kriteria Kanwil DJKN DKI Jakarta		58
b		Jumlah bawahan yang telah melebihi kriteria Kanwil DJKN DKI Jakarta		58
c		Jumlah bawahan total Kanwil DJKN DKI Jakarta		58
		% Capaian Utama		100,00%
		% Capaian Tambahan		100,00%
		Capaian IKU	100%	120,00%

Isu Utama

1. Untuk Tahun 2022 evaluasi pemenuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai dilakukan untuk pegawai dengan Jabatan Pejabat Pengawas (Eselon IV) dan Pelaksana
2. Capaian terdiri dari Capaian Utama dan Capaian Tambahan. Capaian Utama merupakan terdiri dari pegawai (Pejabat Pengawas dan Pelaksana yang telah memenuhi kriteria 24 Jamlat, pelatihan sesuai tusi dan memenuhi usulan DKI (usulan training di DKI pada aplikasi e-performance) dengan pembobotan 100%, sedangkan capaian tambahan adalah merupakan jumlah pegawai yang melebihi 24 Jamlat dan memenuhi usulan DKI (usulan training) dengan pembobotan 20%.

Implikasi

Sampai dengan bulan Desember 2022 52 pegawai telah mengikuti pelatihan melebihi 24 Jamlat dan memenuhi usulan DKI (usulan training) dari jumlah target pegawai sebanyak 52 orang

Akar Masalah

1. Beban kerja yang cukup tinggi serta adanya Work From Home (WFH) menyebabkan beberapa pegawai kesulitan untuk mengikuti e-learning yang telah dijadwalkan.
2. Masih ada beberapa usulan pelatihan yang telah disampaikan ke Kantor Pusat DJKN, namun belum disetujui walaupun pelatihan dimaksud dilakukan dengan metode e-learning.

- Masih ada beberapa pegawai yang telah mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi tetapi belum melaporkan melalui bit.ly/DJKNKJpantaw

Tindakan yang telah dilaksanakan

- Melakukan himbauan kepada para pegawai untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang ditawarkan, dalam hal ini e-learning yang diselenggarakan oleh DJKN bekerja sama dengan BPPK ataupun Lembaga yang lain.
- Melakukan Monitoring terhadap pelatihan (e-learning) yang telah dijadwalkan serta mendorong pegawai mengikuti e-learning dimaksud sesuai jadwalnya maupun pegawai yang belum mengikutinya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan

Rekomendasi Rencana Aksi

- Melakukan bimbingan dan pemberian motivasi kepada para pegawai untuk tetap mengikuti pelatihan-pelatihan yang ditawarkan dan dijadwalkan walaupun tidak sesuai dengan tusinya.
- Melakukan koordinasi dengan Kantor Pusat untuk memberikan kesempatan kepada para pegawai yang berminat mengikuti pelatihan.

Perbandingan Capaian IKU

Persentase pengembangan kompetensi pegawai	Target	Realisasi
2021	100%	120%
2022	100%	120%

10. Sasaran Strategis : Organisasi yang fit for purpose

SS Organisasi yang Fit for Purpose

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
10	Organisasi yang fit for purpose			120%
10a-N	Nilai hasil reuiu pengelolaan kinerja	80	96,85	120,00%

(10a-N) Nilai hasil reviu pengelolaan kinerja

10a-N	P/M	Nilai review pengelolaan kinerja		
		Kanwil DJKN DKI Jakarta	80	96,85
		Capaian IKU		96,85
		Data Untuk Keperluan Monev Kanwil Pada Tiap KPKNL (Tidak Masuk Hitungan IKU)		
		KPKNL Jakarta I	80	
		KPKNL Jakarta II	80	
		KPKNL Jakarta III	80	
		KPKNL Jakarta IV	80	
		KPKNL Jakarta V	80	

Isu Utama

Reviu Pengelolaan Kinerja dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi penyusunan kontrak kinerja, edukasi, monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi

Implikasi

Semua pelaksanaan pengelolaan kinerja di Kanwil DJKN DKI Jakarta harus di dokumentasikan dengan baik

Akar Masalah

Kesadaran yang kurang dari pegawai untuk mengelola kinerja dengan baik karena pencapaian IKU ini memerlukan koordinasi dan kerjasama dari semua pegawai

Tindakan yang telah dilaksanakan

Dokumentasi dilaksanakan secara lengkap dan di file tersendiri

Rekomendasi Rencana Aksi

Dokumen pengelolaan Kinerja tahun 2021 harus semuanya dibuat dan disampaikan tepat waktu

Perbandingan Capaian IKU

Nilai hasil reviu pengelolaan kinerja	Target	Realisasi
2021	75	87
2022	80	96,85

11. Sasaran Strategis : Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal**SS Pengelolaan Keuangan yang dan BMN yang Optimal**

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
11	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal			95,85%
11a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	91,54%	95,85%

(11a-CP) Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

11a-CP	P/M	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	Max/TLK	
		Kanwil DJKN DKI Jakarta	95,5%	91,54%
		Target kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	
		Capaian IKU		91,54%
		Data Untuk Keperluan Monev Kanwil Pada Tiap KPKNL (Tidak Masuk Hitungan IKU)		
		KPKNL Jakarta I	95,5%	98,19%
		KPKNL Jakarta II	95,5%	98,78%
		KPKNL Jakarta III	95,5%	91,91%
		KPKNL Jakarta IV	95,5%	96,68%
		KPKNL Jakarta V	95,5%	1,00

Isu Utama

1. Keterlambatan Penyelesaian Tagihan SPM
2. Keterlambatan Pertanggungjawaban UP dan TUP
3. Penyerapan Anggaran pada Kanwil DJKN DKI Jakarta yang belum optimal

Implikasi

Capaian s.d. Triwulan IV kuning

Akar Masalah

1. Keterlambatan Penyelesaian Tagihan SPM.
2. Keterlambatan Pertanggungjawaban UP dan TUP
3. Wabah Covid-19 yang menyebabkan terganggunya operasional Penyerapan anggaran menjadi kurang optimal.

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Telah dilakukan penyampaian nota dinas ke bidang-bidang terkait identifikasi optimalisasi penyerapan anggaran sampai dengan Bulan Juni 2021.
2. Telah dilakukan penyampaian nota dinas ke bidang-bidang terkait anggaran yang kemungkinan tidak terpakai dan digunakan untuk refocusing anggaran.
3. Telah dilakukan Revisi kewenangan DJA terkait Pergeseran Dana tidak terpakai pada Bidang Teknis ke Umum untuk dapat direalisasikan.

Rekomendasi Rencana Aksi

Melakukan pergeseran anggaran melalui mekanisme kewenangan KPA atau Kanwil DJPb atau DJA

Perbandingan Capaian IKU

Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Target	Realisasi
2022	95,5%	91,54%
2021	95,5%	91,88%
2020	95%	95,97%
2019	95%	96,12%
2018	95%	98,51%

12. Sasaran Strategis : Penguatan Tata Kelola Kehumasan dalam Ekosistem Kolaboratif

SS Penguatan Tata Kelola Kehumasan dalam Ekosistem Kolaboratif

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
12	Penguatan Tata Kelola Kehumasan dalam Ekosistem Kolaboratif			106,06%
12a-N	Indeks Efektivitas ekosistem kehumasan	3,55	3,77	106,06%

(12a-N) Indeks Efektivitas ekosistem kehumasan

12	Penguatan Tata Kelola Kehumasan dalam Ekosistem Kolaboratif		
12a-N P/M	Indeks Efektivitas ekosistem kehumasan	Max/AVG	
	Kanwil DJKN DKI Jakarta	3,55	3,77
	Capaian IKU		3,77

IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2022 yang dibuat untuk mengukur efektivitas ekosistem kehumasan

B. Realisasi Anggaran

DIPA Kanwil DJKN DKI Jakarta tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 8,925,887,000,- dan realisasi DIPA untuk semua jenis belanja sebesar Rp8,849,152,678,- sehingga saldo Rp 76,734,322,-

Adapun rincian realisasi DIPA Kanwil DJKN DKI Jakarta untuk tahun anggaran 2022 sebagai berikut.

No	Rincian Output	Postur Anggaran per 31 Desember 2022			
		Pagu	Realisasi Anggaran	Target Volume RO	Realisasi Volume RO
1	4796.BMB.001 Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	6.050.000	5.250.000	25	75
2	4796.BMB.002 Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang	12.884.000	12577500	40	200
3	4797.FAE.002 Rekomendasi atas Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi	1.008.000	900000	1	12
4	4798.AAH.001 Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	44.188.000	38.038.619	15	20
5	4798.AAH.002 Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	26.974.000	26.491.835	3783	4709
6	4798.AAH.003 Risalah Lelang				
7	4798.AAH.005 Risalah Lelang Sukarela UMKM (PU)				
8	4798.FAE.001 Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan (PU)	208.762.000	200.496.500	1404	1488
9	4798.FAE.003 Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset				
10	4798.FAE.004 Rekomendasi Hasil Kajian Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)				
11	4798.FAE.006 Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	22.982.000	15.436.522	1	3
12	4798.FAE.007 Rekomendasi Hasil Penilaian	8.064.000	8.064.000	1	2
13	4798.FAE.009 Penggalan Potensi Lelang	19.505.000	18.300.000	4	10
14	4798.FAK.001 Aset BUN yang Dikelola	371.871.000	364.316.732	23	188
15	4801.AAH.002 Izin Balai Lelang/Pejabat Lelang Kelas II	16.300.000	16.253.500	110	119
16	4700.EBA.969 Layanan Bantuan Hukum	12.180.000	11.972.000	7	8
17	4701.EBA.002 Kerumahtangaan	43.496.000	41.771.617	12	12
18	4701.EBA.994 Layanan Perkantoran	7.524.302.000	7.485.983.853	12	12
19	4701.EBB.001 Peralatan Fasilitas Perkantoran				
20	4701.EBB.003 Kendaraan Bermotor	604200000	601200000	1	1
21	4701.EBB.004 Gedung/Bangunan				
22	4702.BMB.001 Pembinaan/Edukasi Publik	2071000	1350000	250	750
23	4702.BMB.002 Kehumasan				
24	4702.BMB.003 Pameran/Eksibisi				
25	4704.EBA.001 Rekomendasi Kepatuhan Internal	1.050.000	1.050.000	5	7
TOTAL		8.925.887.000	8.849.452.678		



BAB IV PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Kanwil DJKN DKI Jakarta Tahun 2022 ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Kanwil DJKN DKI Jakarta serta upaya peningkatan *good governance* yang mengacu pada rencana strategis tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta Tahun 2022 ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pencapaian kinerja Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta pada tahun 2022 secara umum dapat dikatakan berhasil/baik. Secara umum kinerja Kanwil DJKN DKI Jakarta tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kanwil DJKN DKI Jakarta tahun 2022 yang diukur berdasarkan pengelolaan kinerja berbasis *balance scorecard* (BSC) dan sejalan dengan program anggaran berbasis kinerja mencapai 112,92% (memenuhi ekspektasi).
- b. Dari 20 IKU Kemenkeu-Two Kanwil DJKN DKI Jakarta tahun 2021, sebanyak 19 IKU dapat tercapai semua target yang telah ditetapkan. 1 IKU dengan realisasi antara 80 s.d 99% dari target.

Dalam rangka mengamankan sasaran dan tujuan diperlukan strategi pemecahan masalah untuk menghadapi berbagai kendala yang ada, strategi yang akan diterapkan oleh Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta adalah :

- a. Meningkatkan koordinasi dan sinergi pelayanan dan melakukan sosialisasi yang terus menerus terhadap *stakeholder* dan *customer*.
- b. Meningkatkan kompetensi para pegawai pada bidang-bidang teknis (bidang pengelolaan kekayaan negara dan bidang penilaian) dalam rangka pencapaian target Revaluasi BMN dan penilaian asset melalui diklat teknis maupun diklat penyegaran (*capacity building*).
- c. Bersama-sama dengan KPKNL melakukan penggalan potensi ke satker K/L untuk lebih meningkatkan optimalisasi aset.

- d. Meningkatkan capaian target pendapatan negara melalui lelang dan piutang Negara lebih sering dilakukan.
- e. Melakukan koordinasi yang lebih intensif kepada satker-satker di wilayah kerja.

Semua yang dicapai saat ini merupakan hasil kerjasama antara Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta dengan KPKNL Jakarta I sampai V yang berada di wilayah kerjanya, dimana hal ini harus ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang. Suatu tujuan tidak akan tercapai apabila tidak ada komitmen dan konsistensi yang telah direncanakan bersama. Untuk itu agar selalu berkomitmen dan konsisten maka dibutuhkan kerjasama dan kebersamaan seluruh aparat/jajaran di lingkungan Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta ini, diharapkan mampu memberikan informasi secara transparan baik kepada instansi vertikal di atasnya maupun pada jajaran aparat di lingkungan Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta. Pada akhirnya diharapkan dapat memberikan masukan dalam mengambil langkah atau kebijakan untuk perbaikan menuju tercapainya visi dan misi yang telah ditetapkan.